
Pengaruh Gerakan Hindutva Terhadap Hubungan Bilateral India-Pakistan Era Kepemimpinan Narendra Modi (2014-2022)

Feby Melati Sukma^{1}, Muh. Asy'ari¹*

¹*International Relation Department, Faculty of Social and Political Sciences, Bosowa University, Makassar 90231*

**Correspondence's email: fbymulti04@gmail.com*

Abstract: *Hindutva is a political ideology that supports Hindu supremacy in India which aims to transform India as a secular state into an ethno-Nationalist State (ethnic nationalism). The revival of Hindutva politics in India began since the Bharatiya Janata Party (BJP) which embraced the Hindutva ideology took over the central government of India in 2014. As an ideology, Hindu nationalism (Hindutva) has dramatically changed Indian politics and its relations with other countries, especially Pakistan with the help of Narendra Modi. Therefore, this study aims to find out the influence of the Hindutva movement on India-Pakistan bilateral relations during the era of Narendra Modi's leadership. This study used descriptive qualitative research methods with library research data collection techniques. The analysis in this study uses two concepts, namely the concept of bilateral relations and the concept of political ideology. The results of this study indicate that the emergence of the Hindutva movement as a political ideology in India has brought more serious strains on the bilateral relations between India and Pakistan.*

Keywords: *India, Pakistan, Hindutva, Political Ideology, Bilateral relations.*

Abstrak: *Hindutva merupakan ideologi politik yang mendukung supremasi Hindu di India yang bertujuan untuk mengubah India dari negara sekuler menjadi Negara etno-Nasionalis (nasionalisme etnis). Kebangkitan politik Hindutva di India dimulai sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menganut ideologi Hindutva mengambil alih pemerintahan pusat India pada tahun 2014. Sebagai sebuah ideologi, Hindutva secara dramatis mengubah politik India dan hubungannya dengan negara-negara lain, khususnya Pakistan dengan bantuan Narendra Modi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gerakan Hindutva terhadap hubungan bilateral India-Pakistan pada era kepemimpinan Narendra Modi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka. Analisis dalam penelitian ini menggunakan dua konsep, yaitu konsep hubungan bilateral dan konsep ideologi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan gerakan Hindutva sebagai ideologi politik di India telah membawa ketegangan yang lebih serius pada hubungan bilateral India dan Pakistan.*

Kata Kunci: *India, Pakistan, Hindutva, Ideologi Politik, Hubungan Bilateral.*

1. Pendahuluan

Pemisahan British India pada tahun 1947 tidak hanya membawa kemerdekaan bagi India dan Pakistan, tetapi juga membawa ideologi politik keagamaan yang mendasarinya. India dan Pakistan mempertahankan identitas agama dan budaya mereka secara terpisah. India membawa identitas dengan populasi mayoritas Hindu dan Pakistan membawa keyakinan Islam sebagai identitasnya (Azam & Khan, 2022:25).

Pada tahun 2014 hubungan konfliktual India dan Pakistan semakin memburuk dengan terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India dan munculnya Partai Bharatiya Janata (BJP) yang membawa ideologi Hindutva. BJP memiliki komitmen untuk mengubah India menjadi *Hindu Rashtra* (Negara Hindu) (Farooq, 2021). Hindutva merupakan ideologi hindu yang diwakili oleh Partai Politik Bharatiya Janata atau Partai Rakyat India (BJP) dan juga merupakan ideologi dari badan budaya yang dikenal sebagai *Rashtriya Swayamsevak Sangh*, atau *National Volunteer Core* (RSS)

yang didirikan pada tahun 1925 dan juga memiliki hubungan yang kuat dengan partai BJP (Sharma, 2020).

Partai BJP didirikan atas dasar Hindutva yang membangun seorang Hindu yang ideal sebagai warga negara India yang khas. Hindutva membayangkan India untuk selalu menjadi negara Hindu, dan Muslim dipandang sebagai sebuah kekuatan asing yang akan mengancam India melalui perang dan invasi (OHCHR, 2020). Hindutva pertamakali diajukan sebagai sebuah ide politik pada tahun 1928 melalui sebuah pamflet yang berjudul "*Hindutva: Who is a Hindu?*" yang ditulis oleh Vinayak Damodar Savarkar (Khrishnan, 2022).

Hal tersebut kemudian melahirkan kelompok yang melindungi kepentingan Hindu dan melawan umat Muslim, seperti *Hindu Mahasabha* atau *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS). RSS merupakan sebuah organisasi bersenjata paling agresif dan berbahaya yang didirikan atas dasar Hindutva. RSS tidak hanya menyebarkan ideologinya di masyarakat, tetapi juga memberikan pelatihan militer di India. Semuanya berjalan baik bagi RSS hingga Mahatma Gandhi berkuasa. Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin yang berjuang untuk hubungan dengan baik dengan Pakistan dan Muslim. Oleh karena itu, seorang anggota RSS membunuh Mahatma Gandhi yang kemudian menimbulkan kerusuhan besar-besaran antara umat Hindu dan Muslim dan membuat hampir satu juta orang kehilangan nyawa (Duzgun, 2022).

Setelah pembunuhan dan kerusuhan tersebut, RSS dan pengikutnya menghilang dan mulai muncul kembali di tahun 50-an, penindasan yang dialami oleh RSS dan pengikutnya karena kematian Mahatma Gandhi membuat mereka mulai terjun ke dunia politik pada tahun 50-an dengan Partai Bharatiya Jana Sangh (BJS). Kemudian pada tahun 1980-an, BJS bergabung dengan partai lain dan membentuk Partai Bharatiya Janata (BJP). Narendra Modi sendiri merupakan anggota RSS yang ditugaskan oleh RSS ke BJP (Duzgun, 2022). Oleh karena itu, jauh sebelum Modi menjadi Perdana Menteri, konflik yang berkaitan dengan ideologi Hindutva telah mewarnai politik dalam negeri India.

Eskalasi konflik yang terkait dengan Hindutva di India merujuk pada meningkatnya ketegangan, perbedaan, dan juga konfrontasi yang terjadi dalam masyarakat India sehubungan dengan paham Hindutva sebagai sebuah konsep politik yang menekankan identitas Hindu dan upaya untuk mengubah India sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Hindu. Meskipun akhirnya telah ada sejak awal abad ke-20, namun konflik yang lebih signifikan terkait Hindutva muncul dalam beberapa periode berbeda.

Pada tahun 1990-an konflik yang melibatkan Hindutva dapat terlihat dari penghancuran Masjid Babri oleh para aktivis Hindu pada tahun 1992, dimana kelompok Hindu mengklaim situs tersebut sebagai tempat kelahiran dewa Rama. Tindakan ini merupakan puncak dari kampanye panjang kemarahan umat Hindu terhadap tetangga Muslim mereka, yakni Pakistan. Karena pemisahan kedua negara di masa lalu. Pasca serangan ini, kerusuhan antar agama melanda beberapa kota di India yang menewaskan lebih dari seribu orang, dimana korban tersebut sebagian besar adalah Muslim (Rhude, 2018).

Pada tahun 2000-an konflik yang melibatkan Hindutva terlihat dari kekerasan Gujarat (2002). Selama pemerintahan Modi di Gujarat, terjadi kekerasan komunal yang membunuh ribuan orang, terutama Muslim. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas agama dan tindakan yang tidak memadai dari pemerintah setempat dalam mengatasi kekerasan. Pasalnya, pada saat itu, Modi selaku ketua Menteri Gujarat diduga menginisiasi kekerasan tersebut. Polisi dan pejabat pemerintah juga diduga telah mengarahkan para perusuh dan memberikan daftar properti milik Muslim kepada mereka (The Times of India, 2023).

Kerusuhan tersebut memicu reaksi keras dari kancah Internasional, terkhusus Pakistan dan menimbulkan ketegangan bagi hubungan kedua negara. Pakistan menyatakan Modi memainkan peran aktif dalam pembunuhan Muslim yang membantunya memposisikan dirinya sebagai pemimpin masa depan partai nasionalis Hindu (Arabnews, 2023). Ketegangan hubungan India dan Pakistan kemudian terlihat semakin memburuk ketika Modi terpilih sebagai Perdana Menteri di India pada tahun 2014. Dimana sejak saat itu kasus-kasus kekerasan komunal antara Muslim dan Hindu lebih sering terjadi. Hal tersebut dipicu oleh isu-isu sensitif terkait keagamaan, seperti pertentangan terhadap konversi agama (GharWapsi), pemotongan sapi dan kontroversi terkait makanan, dan juga perubahan kebijakan terhadap minoritas agama.

Dalam politik dalam negeri India, partai BJP sangat mendukung nasionalisme Hindu yang juga dikenal dengan Hindutva, yang mengesampingkan cita-cita sekularisme yang menjadi dasar konstitusi India (Kallimullah & Mahmood, 2019). Sejak Perdana Menteri Modi berkuasa. Nasionalis Hindu di India merasa diizinkan untuk melemahkan agama minoritas (Muslim) yang ada di India (Azam, 2022). Terlepas dari kenyataan bahwa konstitusi India mengklaim melindungi hak-hak minoritas, nyatanya lembaga yang diisi oleh fasis Hindu telah melanggar hukum dengan tidak mengambil tindakan apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada minoritas di India. Organisasi nasionalis Hindu sayap kanan (VHP, RSS) juga telah menentang dan mengubah pembangunan sosial masyarakat India dengan memaksa minoritas Muslim, Kristen dan agama lain untuk kembali ke Hindu melalui program konversi agama "GharWapsi" (Pulang ke Rumah) (Azam, 2022).

Kebangkitan nasionalisme Hindu menimbulkan ancaman yang serius bagi perdamaian regional, karena intoleransi terhadap Muslim jelas telah melampaui lingkup domestik dan menuju lingkup eksternal (Kallimullah & Mahmood, 2019). Agenda Hindutva telah mendominasi sebagian besar ruang publik di India dan juga mengambil bentuk kebijakan yang beresiko (Danziger, 2020). Khususnya terhadap Pakistan. Pada tahun 2019, BJP menjalankan kampanye untuk memproyeksikan Pakistan sebagai ancaman keamanan nasional yang utama. Pendekatan anti-Muslim yang dipengaruhi oleh Hindutva juga terlihat di India. (Kallimullah & Mahmood, 2019).

Michael Kugelman, wakil direktur program Asia dan senior Associate untuk Asia selatan di Wilson Center menyatakan bahwa pada tingkat diplomatik, Agenda Hindutva yang semakin meningkat pada pemerintahan Modi telah merusak hubungannya dengan negara-negara tetangga, salah satunya adalah Pakistan. Penghapusan klausul konstitusional pasal 370 pada tahun 2019 menjadi salah satu kasus yang sangat jelas. Penghapusan pasal ini sebagian besar didorong oleh pertimbangan nasionalis Hindu karena banyak pemimpin India yang menyatakan keinginan untuk menghapus pasal tersebut di masa lalu. Hubungan Hindutva berakar pada fakta bahwa dengan terhapusnya klausul konstitusi maka jalan bagi orang India dari seluruh negeri untuk melakukan investasi dan memperoleh tanah di Kashmir akan terbuka. Pencabutan pasal ini akan menjerumuskan hubungan India dan Pakistan pada titik terendah baru (Iqbal, 2021).

Sejak terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014, hubungan India dan Pakistan sebagian besar ditandai dengan berbagai perpecahan politik dan diplomatik. Nuansa ideologi nasionalis Hindu tidak hanya terlihat secara luas pada sistem politik India, tetapi juga terhadap Pakistan secara khusus (Azam, 2022:31). Maka dari itu berdasarkan latar belakang ini, penulis akan menganalisa tentang bagaimana gerakan Hindutva berpengaruh terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif, yang merupakan penelitian yang mencoba untuk menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti, sesuai dengan perspektif dan pandangan yang digunakan oleh peneliti untuk membedah fenomena. Serta, digunakan sebagai acuan dalam menggambarkan hasil dan pembahasan yang akan menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" yang ada pada rumusan masalah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sebuah data yang telah diolah atau dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau data yang telah disiapkan oleh lembaga-lembaga atau badan pemerintahan maupun swasta. Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil penelusuran perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan telaah Pustaka (*Library Research*), yaitu Teknik pengumpulan data dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, berita online, dokumen dan laporan resmi yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hindutva merupakan sebuah ideologi politik yang mendukung supremasi Hindu di India yang bertujuan untuk mengubah India sebagai Negara sekuler menjadi Negara etno-Nasionalis (nasionalisme etnik). Hindutva merupakan sebuah ideologi yang dibuat dengan dasar ajaran agama Hindu dan juga merupakan turunan dari ajaran Hindu yang dibuat untuk memasukkan ajaran-ajaran Hindu kedalam ranah politik dengan gagasan Nasionalisme Hindu, yang bertujuan untuk mengubah India sepenuhnya menjadi Negara Hindu.

Kebangkitan politik Hindutva di India dimulai sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merangkul ideologi Hindutva mengambil alih pemerintah pusat India pada tahun 2014 (Truschke, 2020). Sebelumnya, perlu diketahui bahwa setelah kemerdekaan India, para aktor Hindutva telah memainkan peran sentral dalam proses ideologisasi Hindutva di India melalui berbagai tindak kekerasan untuk menciptakan identitas mayoritas. Namun, keberadaan Hindutva tidak benar-benar diurusutamakan sampai dengan pemilihan Perdana Menteri di India pada tahun 2014. Di mana pada saat itu, Modi yang merupakan pemimpin BJP berusaha untuk mengamankan suara dari kelompok mayoritas dan menggunakan posisinya sebagai mantan Ketua Menteri Gujarat sebagai bahan utama dalam memenangkan pemilihan PM India (Leidig, 2020).

Pemerintahan BJP berupaya melakukan ideologisasi di India dengan mendorong berbagai kebijakan dan inisiatif yang dianggap memperkuat identitas Hindu dan prinsip-prinsip Hindutva, seperti:

1. Dengan bantuan BJP, Modi memobilisasi kampanyenya dengan berulang kali mengangkat tema ancaman Muslim terhadap mayoritas Hindu, menciptakan narasi untuk meningkatkan ketidakamanan Hindu di India dan membuat nasionalisme India identik dengan Hindutva sehingga pengarusutamaan Hindutva pasca Narendra Modi terpilih sebagai Perdana Menteri dapat diterima secara luas oleh semua kelas sosial ekonomi masyarakat di India (Leidig, 2020).
2. Mendorong penggunaan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional India, yang dianggap sebagai upaya untuk memperkuat identitas Hindu dan Mendorong penggunaan simbol-simbol Hindu dalam kebijakan pemerintah, seperti memperkenalkan kursi toilet dengan gambar dewa-dewi Hindu (Vaishnav, 2019).
3. Mendorong pembangunan kuil Hindu di Ayodhya, yang dianggap sebagai tempat kelahiran Rama, salah satu dewa Hindu, dan menjadi sumber konflik antara umat Hindu dan Muslim selama beberapa dekade (Vaishnav, 2019).
4. Menerapkan undang-undang yang kontroversial tentang kewarganegaraan yang dianggap diskriminatif terhadap umat Islam.

Sebagai sebuah ideologi, Hindutva secara dramatis telah mengubah politik India dengan bantuan Narendra Modi (Blank, 2019). Dengan memenangkan pemilu pada tahun 2014, pemerintahan di India mulai didominasi oleh BJP dan dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Hal pertama yang terlihat dalam pemerintahan Modi ialah upayanya untuk mengubah citra India, baik di dalam maupun di luar negeri, dimana citra positif dalam pembuatan kebijakan luar negeri dijadikan sebagai bahan utama untuk menjadikan India lebih menonjol dalam panggung global. Namun, upaya tersebut nyatanya membuat pola kebijakan dalam negeri dan luar negeri India menjadi lebih kabur (Kinnvall, 2019). Hal ini kemudian dapat dilihat dari bagaimana ideologi Hindutva mempengaruhi perkembangan politik di India.

Proses ideologisasi Hindutva telah memicu polarisasi sosial dan politik di India. Terjadi berbagai kontroversi terkait hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan juga penafsiran terhadap ideologi Hindutva. Serangkaian perkembangan politik dan kebijakan India yang dipengaruhi oleh nasionalisme Hindu dan menekankan superioritas Hindu juga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan dalam berbagai cara. Adapun pengaruh gerakan Hindutva terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan adalah sebagai berikut:

3.1. Meningkatnya Sentimen Anti-Pakistan

Identitas nasional India yang tengah didominasi oleh Hindutva telah membentuk cara India berinteraksi dengan negara-negara lain. Khususnya Negara tetangga, yakni Pakistan. Kebijakan-kebijakan BJP dan Modi yang mencerminkan dan mendukung mayoritas Hindu di tingkat Pemerintah telah menciptakan ketegangan yang nyata antara umat Muslim-Hindu dan juga India-Pakistan. Pemerintahan Modi dan BJP yang mencoba untuk mengubah India menjadi Negara Hindu dan menghilangkan prinsip-prinsip sekuler India sangat bertentangan dengan identitas nasional Pakistan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Pakistan merupakan sebuah Negara yang didirikan atas nama Islam dan menjadi salah satu negara tetangga India dengan penduduk mayoritas Muslim.

Sejak pemisahan British India pada tahun 1947, Pakistan digagas sebagai rumah bagi Muslim Asia Selatan. Ditahun yang sama, Pakistan juga bergeser dari Negara dengan budaya Muslim menjadi Negara Islam religious yang memeluk sikap "Anti-Indianism" sebagai titik temu nasional (Danziger, 2020). Sedangkan di India, sentiment Anti-Pakistan juga telah menyertai gagasan dan kekerasan anti-Muslim yang meluas. Masyarakat yang memiliki sentiment Anti-pakistan kuat pada akhirnya menolak berbagai upaya kerjasama dan dialog antara India dan Pakistan dan juga tidak menutup kemungkinan mereka akan menyerukan pendekatan yang lebih keras terhadap Pakistan.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa sentiment anti-Pakistan mengacu pada perasaan negatif, ketidaksetujuan, dan bahkan kebencian terhadap Pakistan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Pakistan. Sentimen anti-Pakistan muncul karena beberapa hal seperti sejarah, budaya, sosial, dan juga politik. Sentiment anti-Pakistan yang berkembang di India dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sejarah konflik antara India dan Pakistan, kekerasan lintas batas, dan juga terorisme. Perkembangan sentiment anti-pakistan di India kemudian diperparah dengan munculnya Hindutva sebagai Ideologi Politik India dibawah pemerintahan Modi dan BJP.

Insiden terorisme dan kekerasan lintas batas yang terjadi di India seringkali dikaitkan dengan kelompok militant yang berbasis di Pakistan, sehingga India dibawah Modi dan BJP mengambil kesempatan untuk meningkatkan sentiment anti-Pakistan dengan terus melayangkan tuduhan terhadap Pakistan dan memupuk banyak kebencian masyarakat India terhadap Pakistan. Hal ini kemudian terus meningkatkan ketegangan yang lebih serius antara Hindu-Muslim dan juga India-Pakistan. Sentimen anti-Pakistan yang meningkat di India dapat diamati dalam berbagai bentuk, seperti:

3.1.1. Meningkatnya aksi protes dan demonstrasi sentimen anti-Pakistan

Aksi protes dan demonstrasi di India yang mengungkapkan sentiment anti-Pakistan sering terjadi dalam beberapa situasi, seperti organisasi ekstremis Hindu yang melakukan aksi protes dan menyebabkan pembatalan pertemuan ketua dewan kriket Pakistan (PCB) dengan rekannya di Mumbai (Dawn, 2015). Kelompok sayap kanan Shiv Sena juga melakukan aksi protes terhadap mantan menteri luar negeri Khurshid Mahmud Kasuri yang ingin melakukan peluncuran buku di India dengan meneriakkan slogan-slogan dan meminta membatalkan acara dan juga mengolesinya dengan cat hitam. Hal ini juga membatalkan konser oleh penyanyi populer Pakistan di Mumbai dan Pune (Dawn, 2015).

ACLED mencatat lebih dari 90 protes anti-Pakistan telah terjadi di India, terutama sejak serangan URI yang terjadi pada tahun 2016. Serangan tersebut diyakini telah dilakukan oleh kelompok militan dari Pakistan. Aksi protes tersebut menimbulkan kecaman dan juga tuntutan yang tegas terhadap pemerintah India. Mereka meminta untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap dugaan terorisme yang disponsori oleh Pakistan (ACLED, 2017). Protes dan aksi demonstrasi yang terjadi ada yang berlangsung damai dan juga agresif. Masyarakat India, khususnya ekstremisme Hindu seringkali melakukan aksi protes bahkan kekerasan untuk menghalangi acara-acara di India yang melibatkan warga Pakistan.

3.1.2. Pemanfaatan media sosial sebagai alat penyebaran sentimen anti-Pakistan

Media sosial di India memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik. Beberapa liputan media sosial di India berkontribusi dalam peningkatan sentiment anti-Pakistan di India dengan menyoroti insiden negatif dan menekankan ancaman yang dirasakan karena Pakistan. India menggunakan jaringan media sosial palsu untuk mencemarkan nama baik Pakistan. Sebuah organisasi bernama DisinfoLab yang berbasis di Brussels mengungkapkan bahwa terdapat 265 outlet media palsu yang tersebar di 65 negara. Outlet media tersebut bertugas untuk melayani India dan memiliki fokus utama untuk menanamkan dan memperkuat sentimen anti-Pakistan pada orang India (Mastoor, 2021). Hal tersebut dapat terlihat dari ramainya masyarakat yang menyerukan sentiment anti-Pakistan melalui platform media sosial dengan berbagi postingan, tagar, dan komentar yang mengkritik dan mengutuk Pakistan.

3.1.3. Penggunaan sentimen anti-Pakistan dalam gagasan politik India

Para pemimpin dan partai politik India seringkali menggunakan sentimen anti-Pakistan untuk mendapatkan dukungan politik dan juga pengalihan isu-isu internal yang muncul di India. Sejak pemerintahan Modi, sentiment anti-Pakistan terus muncul di India, dalam berbagai kesempatan anggota-anggota dari partai BJP seringkali menyuarakan sentiment anti-Pakistan secara terbuka. Hal ini terlihat dari seruan dari ketua partai BJP Gujarat yang secara terbuka meminta orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan India untuk pergi ke Pakistan. Tidak hanya itu, BJP Yuva Morcha (sayap pemuda BJP) bahkan mendesak mantan menteri luar negeri dan anggota Lok Sabha, Shashi Tharoor, untuk pergi ke Pakistan karena mengkritik pemerintahan Modi (*The Diplomat*, 2019).

Faksi pro-BJP dan ketua menteri menuduh warga Negara India dan juga intelektual publik yang menentang segala program pemerintah sebagai sikap Anti-India dan menyerukan masyarakat Muslim India untuk pergi ke Pakistan. Pembangkang Muslim dan masyarakat yang "anti-nasional", dituduh sebagai "pro-Pakistan." Wartawan yang kritis terhadap BJP menghadapi pelecehan online yang meluas dari pendukung BJP. Wartawan Rana Ayyub, yang menerbitkan "File Gujarat" menilai masa jabatan Modi dan Shah di pucuk pimpinan negara, disuruh "kembali ke Pakistan." Sarjana Gandhi terkemuka Ramachandra Guha ditahan saat berbicara dengan NDTV tentang konstitusi India dan memegang poster Gandhi. Penulis Aatish Taseer kehilangan status Kewarganegaraan Luar Negeri India setelah menerbitkan konten anti-Modi, setelah itu para pendukung Modi mengecamnya sebagai mata-mata Pakistan (Danziger, 2020). Mereka juga menarik dukungan dan pengikut mereka menggunakan sentiment anti-Pakistan. Pasalnya,

sentiment anti-Pakistan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat luas untuk membuat pernyataan keras terhadap Pakistan dan menuduh Pakistan atas berbagai insiden dan konflik yang terjadi di India.

Melihat perkembangan sentiment anti-Pakistan yang terus berkembang di India, membuat Pakistan angkat suara. Melalui siaran pers yang dikeluarkan oleh Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, Islamabad pada tahun 2020, pemerintah Pakistan menyatakan menolak dengan tegas gagasan anti-Pakistan yang terus menerus berkembang di India dibawah kepemimpinan Modi dan BJP. Pakistan beranggapan bahwa tindakan India untuk meningkatkan sentimen anti-Pakistan dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari kritik internasional atas tindakan illegal yang terjadi di Jammu dan Kashmir serta meningkatnya protes terhadap kebijakan anti-Minoritas di India. Pakistan juga beranggapan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh India hanyalah tuduhan yang didasarkan oleh rekayasa belaka yang digunakan oleh India sebagai alat propaganda (Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, 2020).

Pakistan melihat bahwa peningkatan intoleransi ideologi ekstrimis Hindutva yang terus merasuki institusi India, tidak hanya akan mengancam minoritas India tetapi juga dapat membahayakan perdamaian dan juga stabilitas regional. Oleh karena itu, Pakistan berharap akan ada tindakan yang diambil untuk meminta pertanggungjawaban India atas tindakan illegal dan membuat India dapat menghormati kewajiban internasionalnya (Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, 2020). Melihat respon Pakistan terhadap pemerintahan India yang diiringi oleh Hindutva, sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan kedua Negara yang sangat bertentangan. Perbedaan ideologi membuat kedua Negara membangun sebuah gagasan yang pada akhirnya membuat kedua Negara tersebut juga tidak dapat lepas dari hubungan yang konfliktual.

Berbagai bentuk sentimen Anti-Pakistan yang terus berkembang memiliki kaitan yang sangat erat dengan hubungan bilateral dan dapat memicu meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan. Hal ini dapat mengarah pada kejadian-kejadian di dalam militer atau konflik bersenjata yang memperburuk situasi dan menghambat upaya-upaya diplomasi dan dialog antara kedua negara. Palsunya, sulit untuk mencapai kesepakatan atau membangun kepercayaan jika opini publik dan pemimpin politik di kedua negara memiliki pandangan negatif terhadap pihak lain.

Sentimen Anti-Pakistan juga dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antara kedua negara. Perdagangan dan investasi antara India dan Pakistan dapat dipengaruhi oleh ketegangan politik dan sentimen anti-Pakistan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi India dan Pakistan untuk sampai pada titik perdamaian.

3.2. Munculnya Kebijakan Diskriminatif

Gerakan Hindutva telah memainkan peran dalam membentuk beberapa kebijakan yang dianggap implisit terhadap agama minoritas, terutama Muslim, di India. Hindutva adalah ideologi nasionalis Hindu yang mengutamakan identitas Hindu dan pandangan Hindu yang nasionalistik. Dalam konteks politik India, gerakan Hindutva memiliki pengaruh di dalam maupun di luar pemerintahan India karena gerakan Hindutva telah dijadikan sebagai sebuah ideologi politik yang dianut oleh Modi dan BJP dalam sistem politik pemerintahan India dengan tujuan untuk mengubah India menjadi negara Hindu.

Saat ini, tercatat sekitar dua ratus juta masyarakat Muslim tinggal di India dan membentuk sebuah kelompok minoritas terbesar di Negara dengan mayoritas Hindu. Selama beberapa dekade masyarakat Muslim di India banyak mendapat diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan mereka, serta menghadapi hambatan dalam mencapai kekayaan dan kekuasaan politik dan secara tidak proporsional menjadi korban kekerasan komunal. Perdana Menteri Modi dan Partai BJP yang berkuasa di India juga telah bergerak untuk membatasi hak-hak umat Muslim melalui berbagai undang-undang yang cenderung bersifat anti-Muslim (Maizland, 2022).

Sejak berkuasa di tingkat nasional pada Mei 2014, anggota partai BJP terlihat sangat sering menggunakan gagasa komunal yang banyak menimbulkan tindakan main hakim sendiri terhadap konsumsi daging sapi dan hal-hal yang berkaitan. Di antara bulan Mei tahun 2015 sampai dengan Desember tahun 2018 tercatat setidaknya 44 orang, yang 36 orang di antaranya adalah Muslim, meninggal dunia di 12 negara bagian India. Selama periode yang sama, tercatat sekitar 280 orang terluka dalam lebih 100 insiden berbeda di 20 negara bagian India. Dimana serangan-serangan dalam insiden tersebut dipimpin oleh kelompok perlindungan sapi yang banyak diantaranya mengaku berafiliasi dengan kelompok Hindu militan yang juga memiliki hubungan dengan partai BJP (Human Right Watch, 2019).

Modi dan BJP mengkriminalisasi kepemilikan daging sapi dengan berbagai undang-undang terkait penyembelihan dan kepemilikan sapi yang dikeluarkan di beberapa Negara bagian di India sejak mereka berkuasa, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Undang-Undang	Tahun
Undang-undang Pelestarian Hewan Maharashtra (Amandemen). Undang-undang ini melarang penyembelihan sapi jantan, lembu jantan dan anak sapi dan siapa pun yang ditemukan memiliki daging sapi akan dipenjarakan hingga lima tahun.	2015
Undang-undang Haryana Gauvansh Sanrakshan dan Gausamvardhan. Dalam UU ini, penjualan sapi untuk disembelih ke negara bagian lain akan diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara, enyembelihan sapi akan terancam 10 tahun penjara dan Kepemilikan daging sapi dapat dihukum hingga lima tahun penjara.	2015
RUU Pelestarian Hewan Gujarat (Amandemen). UU ini memperpanjang hukuman penyembelihan sapi yang awalnya tujuh tahun penjara menjadi seumur hidup. UU ini juga memungkinkan penyitaan permanen kendaraan yang mengangkut hewan keculi dalam kondisi tertentu. Denda yang awalnya Rs 1 lakh juga dinaikkan menjadi Rs 5 lakh dal UU ini.	2017
Peraturan Pencegahan Penyembelihan dan Pemeliharaan Sapi Karnatak dan pencabutan undang-undang tahun 1964 yang mengizinkan penyembelihan sapi jantan. Aturan ini akan membuat penyembelihan sapi dihukum hingga tujuh tahun. Pembelian, penjualan, pembuangan atau pengangkutan ternak di luar negara keculi dengan syarat tertentu akan dihukum lima tahun penjara dan denda hingga Rs 10 lakh.	2020

Tabel 1. Undang-Undang Terkait Penyembelihan dan Kepemilikan daging sapi.

Sumber: *The Wire*, 2021

UU terkait penyembelihan daging sapi yang berlaku di beberapa negara bagian di India menimbulkan aksi protes oleh masyarakat muslim yang ada di Kasmir, kelompok-kelompok minoritas dan para aktivis melayankan protes mereka dengan mengatakan bahwa larangan daging sapi tidak sesuai dengan asas sekuler dan juga bertentangan dengan prinsip kebebasan individu di India (BBC, 2015).

Selain penerapan UU terkait penyembelihan daging sapi, BJP dan Modi juga menuduh para pemuda dan pria Muslim ingin mengubah demografi India dengan merayu dan menikahi perempuan hindu untuk melakukan pindah agama melalui jalan cinta dengan momok Jihad Cinta atau yang lebih dikenal dengan "Love Jihad". Momok Jihad Cinta juga terus dikembangkan oleh para pendukung Ideologi Hindutva.

Setiap tahun ada banyak pasangan beda agama yang ingin melaukan pernikahan beda agama dan mengadu ke kelompok sipil penyokong keberagaman yang bernama Dhanak. Dari semua pasangan yang datang tercatat setidaknya 52% perempuan Hindu yang berencana menikah dengan pria Muslim (BBC, 2020). Melihat hal tersebut, BJP dan Modi mengusung undang-undang baru

yang menentang perpindahan agama yang menargetkan jihad cinta. Setelah itu, beberapa Negara bagian India juga mulai mengusung undang-undang yang sama. Undang-undang tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Undang-Undang	Tahun
Undang-Undang Kebebasan Beragama Uttarakhand. UU ini merupakan UU yang pertama kali disahkan oleh pemerintahan BJP setelah teori konspirasi (Love Jihad) mulai beredar. UU ini merupakan aturan yang melarang atau membatasi perpindahan keyakinan. Namun, UU ini mengatakan bahwa 'jika seseorang kembali ke agama leluhurnya' maka ini tidak akan dianggap sebagai konversi. Artinya, pindah agama ke Hindu tidak dihitung sebagai pindah agama.	2018
Undang-Undang Kebebasan Beragama Himachal Pradesh. Undang-undang mensyaratkan pemberitahuan 30 hari untuk individu yang ingin melakukan pindah Agama dengan syarat-syarat tertentu dan Jika Negara menentukan bahwa syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka konversi itu dinyatakan tidak sah dan batal.	2019
Uttar Pradesh Vidhi Viruddh Dharma Samparivartan Pratisedh Adhyadesh (Larangan Konversi Agama Secara Haram). UU ini melarang konversi kecuali dengan izin pemerintah dan pemberitahuan 60 hari sebelumnya dan konversi untuk pernikahan adalah ilegal.	2020
Madhya Pradesh Dharma Swatantreya Adhyadesh (Ordonansi Kebebasan Beragama). UU ini menggantikan Undang-Undang Kebebasan Beragama tahun 1968, dimana Konversi hanya dapat terjadi dengan izin pemerintah dan pemberitahuan 60 hari sebelumnya, UU ini akan menghukum konversi melalui pernikahan selama 10 tahun penjara dan membatalkan pernikahan semacam itu dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan ini dapat menuntut hak atas harta milik ayah mereka.	2020

Tabel 2. Undang-Undang Kebebasan Beragama di India Era Narendra Modi

Sumber: *The Wire*, 2021

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan di pemerintahan Narendra Modi sangat jelas mencerminkan sikap bias terhadap umat Muslim di India. Pada tahun 2018, India mendeportasi sejumlah masyarakat Muslim Rohingya ke Myanmar walaupun nyawa dan keamanan mereka dapat terancam (Human Right Watch, 2020). Setelah memenangkan kembali masa jabatannya pada tahun 2019, Modi mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama dari Negara tetangga (Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan).

Pengesahan UU ini meimbulkan aksi protes besar-besaran di berbagai negara bagian India, aksi protes ini berlangsung selama berhari-hari dan membuat pemerintah India kesulitan untuk menghentikannya. Aksi protes ini meledak disebabkan oleh UU Amandemen Kewarganegaraan yang cenderung bersifat anti Muslim karena UU tersebut memberikan perlindungan kepada agama lain namun tidak dengan penganut Islam (CNBC, 2019). RUU ini cenderung bersifat diskriminatif terhadap umat Muslim karena mengecualikan Muslim dan untuk pertama kalinya UU menerapkan kriteria agama dalam masalah kewarganegaraan. Pemerintah Modi kemudian berpendapat bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi minoritas agama yang rentan yang menghadapi penganiayaan di tiga negara mayoritas Muslim tersebut (Maizland, 2022). Namun, hal tersebut telah melanggar prinsip-prinsip sekuler yang diterapkan dalam konstitusi di India.

Banyaknya tindakan dan kebijakan yang cenderung bersifat anti-Muslim sejak Modi dan Partai BJP berkuasa telah memperlihatkan bagaimana Hindutva sebagai sebuah ideologi yang digunakan

dalam sistem politik India membawa dampak yang signifikan dalam dinamika politik India. Dengan ideologi Hindutva, Modi mengintegrasikan pemikiran fanatik Hindu ke dalam budaya sosial-politik India. Modi dan BJP berupaya untuk memperluas gagasan Hindutva dan mengikis populasi Muslim di India.

Gerakan Hindutva Modi yang telah memperluas identitas hindu ini membuat ketegangan India dan Pakistan sebagai negara mayoritas muslim semakin meningkat. Identitas Hindu yang semakin meluas telah mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat maupun pemimpin India dan Pakistan, serta mempengaruhi dinamika hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pasalnya, Pakistan seringkali menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Muslim di India sebagai dasar untuk mengkritik India dalam hubungan bilateral kedua negara.

Hindutva telah membangun permusuhan dan persaingan antara Pakistan dan India. Jadi, apabila Ideologi Hindutva terus memainkan perannya dalam pemerintahan Modi, konflik campuran akan terus menghiasi hubungan India dan Pakistan di masa depan. Apalagi, Nasionalisme Hindu-Muslim yang dimiliki oleh kedua Negara tersebut telah memperkuat dilemma keamanan dan juga defisit kepercayaan yang sudah ada sejak lama. Nasionalisme Hindu-Muslim juga semakin mendikte kebijakan dan tindakan kedua Negara tersebut. Dan pada akhirnya, serangan nuklir, disonansi persepsi, serangan konvensional intensitas rendah, dan isolasi diplomatik antara India-Pakistan akan terus mengalami peningkatan (Leeza, 2020).

3.3. Meningkatnya Ketegangan di Wilayah Sengketa Jammu & Kashmir

Sejak PM Modi berkuasa pada tahun 2014, situasi di wilayah sengketa, khususnya Kashmir mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan peningkatan ketegangan di wilayah tersebut. Sebelumnya perlu diketahui bahwa gerakan Hindutva mendukung klaim atas wilayah Kashmir sebagai bagian integral negaranya. Oleh karena itu India berupaya untuk sepenuhnya menguasai wilayah Kashmir dengan mengintegrasikan Kashmir kedalam pemerintahan Hindu melalui gerakan Hindutva. Tindakan Modi dan BJP untuk mempromosikan ideologi Hindutva telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Kashmir. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kerusuhan, krisis kemanusiaan, dan ketegangan agama yang meluap di wilayah sengketa tersebut. Meningkatnya ketegangan di wilayah Jammu dan Kashmir yang disebabkan oleh kontribusi Hindutva sebagai ideologi politik yang saat ini tengah mendominasi sistem politik India dapat dilihat dari pencabutan otonomi Kashmir.

Pada tahun 2019, ketika Modi kembali terpilih sebagai perdana menteri, India membuat gebrakan baru Kashmir dengan mencabut secara sepihak otonomi konstitusional satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India selain pulau kecil Lakshadweep, yaitu Jammu dan Kashmir yang diberikan pada tahun 1950-an (Human Right Watch, 2020). India mengatakan pencabutan pasal 370 ini dilakukannya untuk menghapus berbagai pemberontakan bersenjata di wilayah tersebut guna mengantarkan perdamaian (Al-Jazeera, 2022). Sayangnya alasan India untuk mencabut otonomi konstitusional berbanding terbalik realitas yang ada.

Pencabutan pasal 370 dari konstitusi India secara tidak langsung telah membatalkan hak-hak khusus yang dimiliki oleh wilayah sengketa tersebut, baik dalam hal undang-undang maupun kebijakan dalam berbagai bidang. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan dan aksi protes dari masyarakat di wilayah tersebut. Hubungan India dan Pakistan juga mengalami ketegangan yang cukup serius. Selain mencabut Pasal 370, pemerintah Modi juga mengambil kebijakan kontroversial lainnya dengan membagi Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah persatuan teritorial yang lebih kecil, Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Ketegangan pada wilayah sengketa akhirnya semakin memuncak.

Melihat hal tersebut, Modi mencoba untuk mebatasi kebebasan dan komunikasi di wilayah sengketa. pemerintah India mengambil langkah dengan memutus komunikasi, internet, dan

pergerakan di wilayah Kashmir. Langkah ini tentu saja mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk dan memicu protes serta ketegangan lebih lanjut (Human Right Watch, 2019). Pada akhirnya pembunuhan terhadap pemberontak hampir setiap hari terjadi di wilayah sengketa, aksi tembak-menembak dan juga serangan yang direncanakan antara masyarakat sipil dan pejabat keamanan India terus berlangsung. Sejak pencabutan pasal 370 hingga tahun 2022 tercatat setidaknya 197 personel keamanan, 675 tersangka pemberontak, dan 131 warga sipil tewas dalam gelombang kekerasan yang terus melanda wilayah tersebut (Al-Jazeera, 2022).

Melihat hal tersebut, Pakistan mendesak komunitas internasional untuk menyadari berbagai bentuk penganiayaan terhadap minoritas di India, khususnya Muslim, dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India. Pakistan berharap akan ada tindakan yang diambil untuk meminta pertanggungjawaban India atas tindakan illegal dan membuat India dapat menghormati kewajiban internasionalnya (Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, 2020).

Tahun 2019, dapat dikatakan sebagai tahun terburuk dalam dinamika hubungan bilateral India dan Pakistan. Dimulai pada februari 2019 ketika India mengumumkan untuk mencabut *Most Favoured Nation Status* untuk Pakistan dan meningkatkan bea masuk dari Pakistan sebesar 200%, karena serangan terhadap pasukan militer India di wilayah Kasmir yang menewaskan 44 tentara India (Dawn, 2019). Disusul dengan penghapusan Pasal 370 Konstitusi yang memberikan status khusus kepada Jammu dan Kashmir oleh India, yang membuat Pakistan menurunkan hubungan diplomatik dengan India dengan mengumumkan rencana pengusiran duta besar India dan menanggukkan segala bentuk aktivitas perdagangan dengan India (BBC, 2019). Bahkan hingga saat ini masih belum terlihat perbaikan dalam hubungan bilateral kedua negara.

4. Kesimpulan

Gerakan Hindutva adalah gerakan nasionalis Hindu yang berfokus pada promosi identitas Hindu dan pengutamaan nilai-nilai Hindu dalam masyarakat India. Terpilihnya Modi sebagai Perdana Menteri India telah membawa warna baru bagi sistem politik India. Sejak tahun 1989, Partai Bharatiya Janata (BJP) telah berfokus pada agama Hindu dan ideologi nasionalis hindu (Hindutva) dan Narendra Modi, Perdana Menteri India, telah menjadi tokoh kunci dalam politik Hindutva. Oleh karena itu, terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India membuat Hindutva mendominasi sistem politik di India.

Gerakan politik Hindutva di India dipengaruhi oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) dan ideologi Hindu. Sejak 2014, Hindutva aktif bekerja untuk membangun identitas nasional dan sejajar dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Gerakan ini juga mempengaruhi perkembangan hubungan India dengan negara lain, khususnya Pakistan. India dan Pakistan memiliki ideologi yang sangat bertentangan. Perbedaan ideologi tersebut membuat India dan Pakistan tidak dapat lepas dari hubungan yang konfliktual. Serangan, perang, dan kerusuhan terus mewarnai hubungan kedua Negara. Apalagi dengan latar belakang sejarah dan politik yang membuat kedua negara sulit untuk mencapai titik perdamaian.

Munculnya gerakan Hindutva sebagai sebuah ideologi politik di India telah membawa ketegangan yang lebih serius terhadap hubungan kedua negara karena pengaruh Hindutva yang telah mendominasi sistem politik India dan juga mengatur bagaimana India berinteraksi dengan Pakistan. Adapaun pengaruh gerakan Hindutva sebagai sebuah ideologi politik India terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan dapat dilihat dari:

1. Meningkatnya Sentimen Anti-Pakistan: Meningkatnya sentimen anti-Pakistan yang disebabkan oleh gerakan Hindutva dapat terlihat dari berbagai aksi protes dan juga kebencian masyarakat India terhadap semua hal yang bersangkutan dengan Pakistan. Sentimen anti-Pakistan yang terus mberkembang kemudian membawa dampak yang

- signifikan pada hubungan antara India dan Pakistan. Gerakan Hindutva yang mendorong nasionalisme Hindu dan membenamkan identitas Hindu akan mempengaruhi persepsi masyarakat India terhadap Pakistan dan juga mempengaruhi dinamika politik dan diplomasi antara kedua negara.
2. Munculnya Kebijakan Diskriminatif : Sejak terpilih sebagai Perdana Menteri India, Narendra Modi telah membuat berbagai kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama terhadap minoritas agama, terutama Muslim. Hal ini kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat maupun pemimpin India dan Pakistan dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan kedua negara tersebut.
 3. Meningkatnya ketegangan di Wilayah Kashmir : Sejak pemerintahan Modi, kerusuhan di wilayah Kashmir terlihat mengalami peningkatan, apalagi dengan dicabutnya status otonomi Kashmir. Meningkatnya ketegangan di wilayah Kashmir dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi keamanan regional dan hubungan bilateral India-Pakistan.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Azam, A. 2022. Indian Foreign Policy towards Pakistan during Modi Era: Assessing the Role of Hindu Nationalism. *TTN Journal*. Vol 1, No 1. https://bttm.org.pk/ojs/index.php/BTTN_Journal/article/view/9/22. Diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Azam, A & Khan, A. 2022. Role of Hindu Nationalism and Its Influence on India's Political Conduct. *Pakistan Journal of International Affairs*. Vol 5, No 2. <http://pjia.com.pk/index.php/pjia/article/view/417>. Diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Farooq, M. 2021. Rise of Hindutva in India: Effects on Pakistan-India Relations (2014-2019). <http://pr.hec.gov.pk/jspui/bitstream/123456789/18651/1/Muhammad%20Farooq%20IR%202021%20uop%20lhr.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
- Leidig, E. 2020. Hindutva as a variant of right-wing extremism. *Patterns of Prejudice*, 54:3, 215-237. DOI: 10.1080/0031322X.2020.1759861. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/0031322X.2020.1759861?needAccess=true&role=button>. Diakses pada 11 Mei 2023.
- Mastoor, M. 2021. Why India Wishes to Destabilize Pakistan?. *Institute of Regional Studies, Islamabad*. <http://irs.org.pk/Spotlight/SP12021.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.
- Kalimullah & Mahmood, A. 2019. Role Of Hindutva And Pragmatism In Modi's Foreign Policy Towards Pakistan. *Journal of Contemporary Studie*. Vol VIII, No 2. <https://jcs.ndu.edu.pk/site/article/view/40>. Diakses pada 25 November 2022.
- Kinnvall, C. 2019. Populisme, ketidakamanan ontologis dan Hindutva: Modi dan maskulinisasi politik India. *Cambridge Review of International Affairs*. Volume 32, 3. 283-302. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2019.1588851>. Diakses pada 19 Juni 2023.
- Sharma, Arvind. 2020. On the Difference Between Hinduism and Hindutva. *Association for Asian Studies*. Vol 25. No 1. <https://www.asianstudies.org/publications/ea/archives/on-the-difference-between-hinduism-and-hindutva/>. Diakses pada tanggal 27 April 2023.
- Truschke, A. 2020. Hindutva's Dangerous Rewriting of History. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 24/25. <http://journals.openedition.org/samaj/6636>. Diakses pada 9 Mei 2023.

Website:

- ACLEDD. 2017. Hubungan India-Pakistan. <https://acleddata.com/2017/02/07/india-pakistan-relations/>. Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Aljazeera. 2022. Has India's Kashmir policy under Modi failed?. <https://www.aljazeera.com/news/2022/6/15/has-india-kashmir-policy-under-modi-failed>. Diakses pada 29 Juli 2023.

- Aljazeera. 2022. In Kashmir, India's home minister says no to talks with Pakistan. <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/5/in-kashmir-indias-home-minister-says-no-talks-with-pakistan>. Diakses pada 29 Juli 2023.
- Arabnews. 2023. Pakistan expresses concern over Indian politician's statement about BJP's involvement in Gujarat riots. <https://www.arabnews.pk/simpul/2207091/pakistan>. Diakses pada 22 Agustus 2023.
- Blank, J. 2019. How Hinduism Became a Political Weapon in India. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/05/hindu-nationalism-narendra-modi-india-election/590053/>. Diakses pada 17 Juni 2023.
- BBC. 2015. Daging sapi dilarang, Muslim di Kashmir protes. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150911_majalah_sapi_kashmir. Diakses pada 27 Juli 2023.
- BBC. 2019. Article 370: What happened with Kashmir and why it matters. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708>. Diakses pada 4 Juli 2023.
- BBC. 2019. Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393>. Diakses pada 29 Juni 2023.
- BBC. 2020. 'Jihad cinta': Undang-undang yang mengancam cinta lintas agama di India. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-55225769>. Diakses pada 29 Juni 2023.
- CNBC Indonesia. 2019. India Tsunami Demo Karena UU Anti Muslim, PM Modi Buka Suara. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191223075519-4-125078/india-tsunami-demo-karena-uu-anti-muslim-pm-modi-buka-suara>. Diakses pada 3 Agustus 2023.
- Danziger, S. 2020. Dividing Lines: What India's Hindu Nationalist Turn Portends for Relations with Pakistan. *South Asian Voices*. <https://southasianvoices.org/dividing-lines-what-indias-hindu-nationalist-turn-portends-for-relations-with-pakistan/>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022.
- Dawn. 2023. Minister concerned over rising anti-Pakistan sentiments in India. <https://www.dawn.com/news/1214160>. Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Dawn. 2015. Shiv Sena assaults Kasuri's host in Mumbai. <https://www.dawn.com/news/1212646>. Diakses pada 04 Agustus 2022.
- Dawn. 2019. 44 Indian security personnel killed in held Kashmir attack. <https://www.dawn.com/news/1463946>. Diakses pada 4 Juli 2023.
- Duzgun, A. N., 2022. Historical roots of Hindutva. *AA Analysis*. <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-historical-roots-of-hindutva/2642253#>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.
- Human Right Watch. 2017. World Report 2017: India. <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/india>. Diakses pada 25 Juni 2022.
- Human Right Watch. 2019. India: Vigilante 'Cow Protection' Groups Attack Minorities. <https://www.hrw.org/news/2019/02/19/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities>. Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Human Right Watch. 2020. "Shoot the Traitors" Discrimination Against Muslims under India's New Citizenship Policy. <https://www.hrw.org/report/2020/04/10/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new-citizenship-policy>. Diakses pada 23 Juni 2023.
- Iqbal, K. 2021. The Rise of Hindutva: A Global Perspective. <https://www.hilal.gov.pk/eng-article/detail/NTMzNg==.html>. Diakses pada tanggal 22 November 2022
- Krishnan, Murali. 2022. India: Is 'Hindutva' a Civilizational Principle?. *Deutsche Welle (DW)*. <https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/india-is-the-ruling-bjps-hindutva-approach-a-civilizational-principle/a-60835665>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
- Leeza, K. 2020. Is Hindutva Ideology Contributing To The India-Pakistan Conflict?. *9Dashline*. <https://www.9dashline.com/article/is-hindutva-ideology-contributing-to-india-pakistan-conflict>. Diakses pada 30 Juni 2023.

- Maizland, L. 2022. India's Muslims: An Increasingly Marginalized Population. Council on Foreign relation. <https://www.cfr.org/background/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi#chapter-title-0-8>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023.
- Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan. 2020. Pakistan rejects Indian Leadership's anti-Pakistan rhetoric. <https://mofa.gov.pk/pakistan-rejects-indian-leaderships-anti-pakistan-rhetoric/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2023.
- Rhude, K. 2018. Destruction of Ayodhya Mosque. Harvard Divinity School. <https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/violence-peace/destruction-ayodhya-mosque>. Diakses pada 22 Agustus 2023.
- The Diplomat. 2019. The Pakistan Factor in the 2019 Indian General Elections. <https://thediplomat.com/2019/01/the-pakistan-factor-in-the-2019-indian-general-elections/>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2023.
- The Times of India. 2023. 2002 Gujarat Riots. <https://timesofindia.indiatimes.com/miscellaneous/2002-gujarat-riots/articleshow/60732493.cms?from=mdr>. Diakses pada 22 Agustus 2023.
- The Wire. 2021. Book Excerpt: The Many Anti-Muslim Laws Brought in By the Modi Government. <https://thewire.in/politics/price-of-the-modi-years-book-excerpt>. Diakses pada 23 Juni 2023.
- Vaishnav, M. 2019. The BJP in Power: Indian Democracy and Religious Nationalism. <https://carnegieendowment.org/2019/04/04/bjp-in-power-indian-democracy-and-religious-nationalism-pub-78677>. Diakses pada 23 September 2023.

